

# PENGARUH PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KRANGGAN KOTA MOJOKERTO

**Riza Imtikhana**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
e-mail: [riza.15040674120@mhs.unesa.ac.id](mailto:riza.15040674120@mhs.unesa.ac.id)

**Tjitjik Rahaju, S.Sos. M.Si.**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
e-mail: [tjitjikrahaju@unesa.ac.id](mailto:tjitjikrahaju@unesa.ac.id)

## Abstrak

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mojokerto tahun 2017 menyebutkan bahwa jumlah penduduk Kota Mojokerto ialah 140.161 jiwa dan luas wilayah hanya 16,47 kilometer. Sehingga hal tersebut menyebabkan kepadatan penduduk yang tinggi yaitu 8.511 penduduk per kilometer persegi ( $\text{km}^2$ ) yang dapat menghambat pelayanan publik. Selain itu pemekaran daerah dilakukan karena Kota Mojokerto tidak memenuhi persyaratan sebagai kota dikarenakan hanya mempunyai 2 kecamatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemekaran kecamatan terhadap efektivitas pelayanan di Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan yaitu asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik Pengambilan Sampel yang dilakukan dengan metode *cluster random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemekaran kecamatan (X) tidak berpengaruh terhadap variabel efektivitas pelayanan publik (Y). Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t dan uji F yaitu hasil uji nilai t hitung sebesar -1,611 dengan p-value sebesar 0,110. Nilai tersebut lebih besar dari yang ditetapkan untuk tingkat signifikan 5%, yaitu apabila hasil signifikansi kurang dari 5% maka  $H_0$  diterima. Namun pada hasil uji t nilai signifikansi lebih besar dari 5% ( $0,110 > 0,05$ ). Sedangkan hasil uji F yaitu Fhitung sebesar 2,596 yang berarti kurang dari Ftabel. Sehingga dapat disimpulkan variabel independen (pemekaran kecamatan) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (efektivitas pelayanan publik).

**Kata Kunci** : Pemekaran, Pelayanan Publik.

## Abstract

Data Central Bureau of Statistics (BPS) Mojokerto town in 2017 states that the population of Mojokerto Town is 140,161 inhabitants and the area of only 16.47 kilometers. So that causes a high population density of 8,511 residents per square kilometer ( $\text{km}^2$ ) that can hamper public services. In addition, the regional separation is done because Mojokerto town does not meet the requirements as a city because it only has 2 districts. The purpose of this study was to examine the effect of subdistrict separation on the effectiveness of services in the Kranggan district, Mojokerto town. The type of research used is associative with quantitative approach. Sampling technique is done by cluster random sampling method. The results showed that the variable X subdistrict separation did not affect the variable Y effectiveness of public services. This is indicated by the result of t test and F test that is the result of t test value equal to -1,611 with p-value equal to 0,110. The value is greater than set for a significant level of 5%, ie if the result of significance is less than 5% then  $H_0$  is accepted. However, in the test results t significance value greater than 5% ( $0.110 > 0.05$ ). While the test results F is Fcount of 2.596 which means less than Ftabel. So it can be concluded independent variables (the extraction of subdistrict) simultaneously have no effect on the dependent variable (effectiveness of public services).

**Keywords**: Separation, Public Service.

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia mempunyai bentuk negara kesatuan yang kokoh dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Desentralisasi sebagai implikasi negara kesatuan dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu terhadap tanggungjawab urusan pemerintahan. PP No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan tersebut menjelaskan bentuk kewenangan dari pemerintah daerah antara lain pemerintah daerah mempunyai kewenangan melakukan pemekaran wilayah yakni Penghapusan, Penggabungan,

dan Pembentukan Kecamatan. Salah satu jenis pembentukan daerah adalah pemekaran daerah. Menurut Trueblood *etc* dalam Santoso (2015: 35) pemekaran (*fragmentation*) diartikan sebagai pemecahan dari satu pemerintahan daerah menjadi dua atau lebih pemerintahan daerah. Harapan meratanya pelayanan publik dengan pelaksanaan desentralisasi tersebut sebagaimana yang diinginkan pemerintah daerah. Juga sebagai upaya untuk mengatasi masalah terkait pada daerah yang jumlah penduduknya tinggi dan tidak

seimbang, yang dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks.

Permasalahan yang dimaksud nampaknya juga terjadi di Kota Mojokerto. Besarnya jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah yang dimiliki Kota Mojokerto tidak seimbang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mojokerto tahun 2016 menyebutkan bahwa jumlah penduduk Kota Mojokerto ialah 140.161 jiwa dan luas wilayah hanya 16,47 kilometer. Sehingga hal tersebut menyebabkan kepadatan penduduk yang tinggi yaitu 8.511 penduduk per kilometer persegi ( $\text{km}^2$ ).

Kondisi tersebut membawa implikasi pada pelayanan yang diberikan oleh kecamatan. Sebagaimana diketahui bahwa kecamatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan yang merata, efisien, dan efektif. Oleh karena itu penting bagi Kota Mojokerto melakukan pemekaran kecamatan yaitu dengan cara membentuk suatu kecamatan baru, yakni Kecamatan Kranggan.

Pembentukan kecamatan Kranggan di Kota Mojokerto mempunyai tujuan tertentu seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 Perda Kota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kranggan yaitu untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, pembentukan kecamatan Kranggan diharapkan mampu mendekatkan pelayanan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih efektif. Dengan dibentuknya Kecamatan Kranggan, masyarakat tidak perlu mengantri lama seperti sebelumnya yang hanya terpusat di 2 kecamatan yaitu kecamatan Magersari dan Prajurit Kulon. Sehingga setelah pemekaran kecamatan, pelayanan publik dapat diberikan melalui kecamatan Magersari, Prajurit Kulon, dan Kranggan.

Pembentukan kecamatan baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan menjadi efektif dan efisien sesuai tujuan yang ditetapkan pada Perda Kota Mojokerto No 17 Tahun 2015 dan UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah disebutkan. Dengan adanya pembentukan Kecamatan Kranggan, diharapkan memberikan perubahan sesuai dengan tujuan pembentukannya yaitu peningkatan pelayanan publik. Namun dalam pembentukan/pemekaran Kecamatan Kranggan dapat saja menjadikan pelayanan tidak efektif apabila belum adanya kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia yang berkompeten. Oleh sebab itu seharusnya pemekaran kecamatan dilakukan karena kebutuhan pelayanan publik bukan kepentingan kekuasaan.

Berdasarkan permasalahan yang telah digambarkan di atas, diketahui bahwa pemekaran kecamatan dilakukan untuk mengatasi masalah

kependudukan dan luas wilayah yang tidak seimbang, untuk memenuhi persyaratan sebagai kota, dan meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pemekaran Kecamatan Terhadap Efektivitas Pelayanan di Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto. Pada penelitian ini ditetapkan hipotesis yaitu terdapat pengaruh pemekaran kecamatan terhadap efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk menguji pengaruh pemekaran kecamatan terhadap efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Tempat lokasi penelitian di Kantor Kecamatan Kranggan dan 6 (seluruh) kelurahan di Kecamatan Kranggan sebagai sampel daerah penyebaran angket/kuisisioner yaitu Kelurahan Kranggan, Meri, Miji, Jagalan, Sentanan, serta Purwotengah. Populasi dalam penelitian ini ialah penduduk di Kecamatan Kranggan yang berjumlah 38.817 jiwa.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Cluster Random Sampling* atau Teknik Sampling Daerah. Dengan menggunakan rumus slovin diperoleh jumlah sampel atau responden dalam penelitian ini ialah sebanyak 100 responden. Karakteristik responden pada penelitian ini ialah berdasarkan usia, status perkawinan, jenis kelamin, dan pekerjaan.

Variabel independen/bebas dalam penelitian ini adalah Pemekaran Kecamatan(X) dan variabel dependen (Y) pada penelitian ini ialah Efektivitas Pelayanan Publik. Instrumen penelitian yang terdiri dari indikator variabel pemekaran kecamatan diuraikan berdasarkan tujuan pemekaran kecamatan oleh Roesman (2007:1) yakni indikator keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur, mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintahan dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Sedangkan indikator variabel efektivitas pelayanan publik diuraikan berdasarkan asas-asas pelayanan publik pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. Menurut Sugiyono (2015: 261) menyatakan bahwa analisis regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan fungsional

ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel independen. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah melalui wawancara, angket/kuisisioner, dan observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemekaran Kecamatan Kranggan dilakukan untuk mencapai tujuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik setelah adanya pemekaran tersebut. Oleh karena itu pemekaran kecamatan diuji terhadap efektivitas pelayanan publik untuk mengetahui bagaimana pengaruh adanya pemekaran Kecamatan Kranggan. Pengaruh pemekaran kecamatan terhadap efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Kranggan di Kota Mojokerto dapat diketahui dengan menggunakan uji t dan uji F dan persamaan regresi linear sederhana.

### 1. Uji t

Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ( $X_i$ ) secara individual mempengaruhi variabel dependen ( $Y$ ). Penelitian ini menggunakan tingkat/ taraf signifikan 5% (0,05) sehingga apabila hasil signifikansi kurang dari 5% maka  $H_0$  diterima, namun jika hasil signifikansi lebih dari 5% maka  $H_0$  ditolak dengan nilai t tabel =  $t_{0,05;98} = 1,661$ .

Tabel 1. Pengaruh Pemekaran Kecamatan Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik

Variabel	Koefisien regresi	t	P-value	Kesimpulan
Pemekaran Kecamatan	-0,369	-1,611	0,110	Tidak Berpengaruh

Berdasarkan Tabel 1. diatas dapat disimpulkan bahwa nilai |thitung| sebesar -1,611 kurang dari t table sebesar 1,661 ( $1,611 < 1,661$ ). Selain itu dapat diketahui melalui nilai signifikansi atau P-value yakni sebesar 0,110. Nilai signifikansi tersebut lebih dari taraf signifikansi 0,05 (5%).  $H_0$  diterima apabila nilai signifikansi kurang dari taraf signifikansi sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak. Dengan demikian dapat diartikan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh variabel pemekaran kecamatan ( $X$ ) terhadap efektivitas pelayanan publik ( $Y$ ).

### 2. Uji F atau Uji Simultan

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh variabel bebas (pemekaran kecamatan) secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel tidak bebas (efektivitas pelayanan publik). Pengambilan keputusan dengan menggunakan signifikansi yaitu apabila hasil signifikansi kurang dari 5% maka  $H_0$  diterima, namun

jika hasil signifikansi lebih dari 5% maka  $H_0$  ditolak dengan F tabel =  $F_{0,05;1;98} = 3,938$ .

Tabel 2. Hasil Uji F

### Anova<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	45.598	1	45.598	2.596	.110 <sup>b</sup>
	Residual	1721.152	98	17.563		
	Total	1766.750	99			

a. Dependent Variable: Efektivitas Pelayanan Publik

b. Predictors: (Constant), Pemekaran Kecamatan

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat diketahui bahwa nilai Fhitung yaitu 2,596, nilai tersebut kurang dari Ftabel. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,110. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (5%). Variabel pemekaran kecamatan ( $X$ ) dapat dinyatakan berpengaruh simultan terhadap variabel efektivitas pelayanan publik ( $Y$ ) apabila nilai signifikansi kurang atau lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (5%). Ini berarti bahwa variabel independen (pemekaran kecamatan) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (efektivitas pelayanan publik). Dengan demikian  $H_0$  yang menyatakan ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pemekaran kecamatan terhadap efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, ditolak karena nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (5%).

Pengujian hipotesis juga dianalisis melalui uji regresi sederhana untuk menemukan persamaan regresi. Untuk menguji kebenaran hipotesis terkait pengaruh pemekaran kecamatan terhadap efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, maka penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. Salah satunya Koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang digunakan untuk mengetahui prosentase perubahan variabel tidak bebas ( $Y$ ) yang disebabkan oleh variabel bebas ( $X$ ).

Tabel 3. Hasil Koefisien Determinasi

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.161 <sup>a</sup>	.026	.016	4.191	.713

a. Predictors: (Constant), Pemekaran Kecamatan

b. Dependent Variable: Efektivitas Pelayanan Publik

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa besarnya nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,026. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel efektivitas pelayanan

publik (Y) sebesar 2,6% dipengaruhi oleh variabel pemekaran kecamatan (X), sedangkan sisanya 97,4% dikarenakan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

### 3. Persamaan Regresi Linear Sederhana

Dalam persamaan regresi, ada harga a dan b yang diperoleh melalui uji regresi seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 Constant	65.104	4.398		14.803	.000
Pemekaran Kecamatan	-.369	.229	-.161	1.611	.110

Nilai konstanta (a) sebesar 65,104 menunjukkan bahwa apabila variabel pemekaran kecamatan (X) sama dengan nol atau konstan maka nilai efektivitas pelayanan publik (Y) akan naik sebesar 65,104 satuan. Selanjutnya nilai (b) ditunjukkan pada menu *Unstandardized Coefficient B* pemekaran kecamatan yakni sebesar -0,369. Nilai yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah antara efektivitas pelayanan public (Y) dengan pemekaran kecamatan (X) yang artinya jika pemekaran kecamatan (X) naik sebesar satu satuan maka sebaliknya nilai efektivitas pelayanan publik (Y) akan turun sebesar 0,369 satuan. Harga a dan b sudah ditemukan, maka persamaan regresi linear sederhana dapat disusun. Berdasarkan Tabel 4.38 tersebut maka dapat dibuat model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b X$$

$$Y = 65,104 - 0,369 X$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila variabel pemekaran kecamatan (X) naik satu satuan/persen maka nilai efektivitas pelayanan publik akan turun sebesar 0,369. Berdasarkan hasil analisis untuk variabel pemekaran kecamatan maka diperoleh nilai t hitung sebesar -1,611 dengan p-value sebesar 0,110. Karena nilai sig. pada penelitian ini lebih dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemekaran kecamatan tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik. Hasil uji t tersebut juga berdampak pada uji F. Hal ini dikarenakan uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh variabel bebas (pemekaran kecamatan) secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas (efektivitas pelayanan

publik. Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa nilai sig.  $> \alpha$  ( $0,110 > 0,05$ ) sehingga  $H_0$  ditolak. Hal Ini berarti bahwa variabel independen (pemekaran kecamatan) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (efektivitas pelayanan publik).

Hasil analisis uji t, uji F, dan koefisien determinasi dapat dikatakan bahwa variabel pemekaran kecamatan (X) tidak berpengaruh terhadap variabel efektivitas pelayanan publik (Y). Besar perubahan variabel Y yang disebabkan oleh variabel X pemekaran kecamatan hanya 0,026 atau 26% saja. Hasil penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Selty Setiami Rohmi (2009), Tata Yusuf (2010), Okti Selvia (2014), dan Nurhairoti (2015) yang menyatakan bahwa pemekaran kecamatan berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik. Perbedaan tersebut karena faktor lain dalam proses pemekaran kecamatan seperti kondisi setelah pemekaran, ketidaksiapan sarana prasarana, dan pemekaran yang masih baru yaitu 1 tahun. Sehingga belum adanya perbedaan pelayanan yang signifikan antara pelayanan yang dilakukan sebelum pemekaran kecamatan dan setelah pemekaran kecamatan.

Pada paparan hasil penelitian, ditemukan beberapa item kuisisioner yang mempunyai nilai rendah dan nilai tidak setuju yang cukup tinggi. Pada variabel pemekaran kecamatan (X), ada beberapa item kuisisioner yang bernilai rendah yaitu antara lain item kuisisioner nomer 3 atau disingkat menjadi PK3 yaitu apakah pendapatan masyarakat meningkat daripada sebelum pemekaran Kecamatan Kranggan. Item kuisisioner nomer 3 (PK3) mempunyai nilai skor sangat rendah sebesar 232 dan jawaban negatif tidak setuju terdapat 66 responden dan 1 responden sangat tidak setuju. Item ini ialah item kuisisioner yang mempunyai nilai total paling rendah dari kuisisioner lainnya. Berdasarkan jawaban tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat merasakan pemekaran kecamatan belum banyak meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini berbeda dengan tujuan adanya pemekaran kecamatan yaitu salah satunya dukungan ekonomi melalui peningkatan pendapatan masyarakat.

Selanjutnya pada variabel pemekaran kecamatan (X) diketahui bahwa item kuisisioner nomer 6 (PK6) yaitu terserapnya masyarakat yang lebih luas sebagai tenaga kerja di pemerintah Kecamatan Kranggan setelah adanya pemekaran kecamatan dan item kuisisioner PK7 yaitu terserapnya pemimpin lingkungan Kecamatan Kranggan yang berasal dari masyarakat Kecamatan Kranggan. Item

nomer 6 (PK6) mempunyai nilai skor total yaitu sebesar 240 dengan jawaban tidak setuju sebanyak 62 responden, sedangkan item kuisisioner nomer 7 (PK7) juga mempunyai nilai skor total yang cukup rendah yaitu sebesar 264 dan jawaban tidak setuju sebanyak 37 responden. Dengan nilai skor yang rendah tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemekaran kecamatan Kranggan dalam penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Kranggan baik sebagai pegawai maupun pemimpin di lingkungan Kecamatan Kranggan.

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui pada variabel efektivitas pelayanan publik (Y) juga mempunyai beberapa item kuisisioner yang bernilai rendah dan negatif seperti pada item kuisisioner nomer 3 (EP3), item kuisisioner nomer 5 (EP5), item kuisisioner nomer 12 (EP12). Item kuisisioner EP3 yaitu pelayanan yang dilakukan oleh pegawai Kecamatan Kranggan dapat diakses melalui teknologi telekomunikasi. Item tersebut mempunyai nilai paling rendah pada variabel efektivitas pelayanan publik yaitu nilai skor total 257 dan banyaknya responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 49 orang. Ini berarti sebagian besar masyarakat belum merasakan kemudahan mengakses penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah Kecamatan Kranggan melalui teknologi telekomunikasi seperti website, telepon, sms. Sedangkan item kuisisioner EP5 yaitu pelayanan yang diberikan pemerintah Kecamatan Kranggan bisa didapatkan oleh masyarakat Kecamatan Kranggan yang membutuhkan. Item tersebut mempunyai nilai skor total 273 dan jawaban tidak setuju sebanyak 31 orang/responden. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah Kecamatan Kranggan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Pada item berikutnya yaitu EP12 pegawai Kecamatan Kranggan mampu melayani masyarakat dengan baik. Item ini juga mempunyai nilai total rendah sebesar 273 dan jawaban tidak setuju sebanyak 42 responden. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai pemerintah Kecamatan Kranggan dirasakan belum memiliki kemampuan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat. Sehingga tujuan pelayanan publik dalam aspek kondisional yaitu pelaksanaan pelayanan menyesuaikan dengan kemampuan pegawai dan masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan nilai item-item yang rendah dan banyaknya jawaban tidak setuju, penyelenggaraan pemerintahan setelah adanya pemekaran Kecamatan

Kranggan perlu diperbaiki sesuai apa yang menjadi tujuan pemekaran kecamatan khususnya mengenai dukungan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sebagai di lingkungan Kecamatan Kranggan baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Begitu pula dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kranggan perlu diperbaiki. Khususnya dalam hal transparansi yaitu kemudahan mengakses pelayanan melalui teknologi telekomunikasi melalui website atau situs online, telepon, sms dan pelayanan yang diberikan pemerintah Kecamatan Kranggan bisa didapatkan oleh masyarakat Kecamatan Kranggan yang membutuhkan yang lebih luas.

## PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa variabel X pemekaran kecamatan tidak berpengaruh terhadap variabel Y efektivitas pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t dan uji F yaitu hasil uji nilai t hitung sebesar -1,611 dengan p-value sebesar 0,110. Nilai tersebut lebih besar dari yang ditetapkan untuk tingkat signifikan 5%, yaitu apabila hasil signifikansi kurang dari 5% maka  $H_0$  diterima. Namun pada hasil uji t nilai signifikansi lebih besar dari 5% ( $0,110 > 0,05$ ). Besar prosentase perubahan variabel dependen (Y) efektivitas pelayanan publik yang disebabkan oleh variabel independen (X) pemekaran kecamatan sebesar 26%. Hasil variabel pemekaran kecamatan tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi sarana prasarana yang belum siap, dan masih barunya pemekaran kecamatan Kranggan dilakukan yaitu masih 1 tahun. Pada hasil penelitian juga ditemukan beberapa indikator dengan item kuisisioner yang bernilai rendah dan negatif yaitu antara lain:

1. Pada variabel pemekaran kecamatan item kuisisioner nomer 3 (PK3) yaitu apakah pendapatan masyarakat meningkat daripada sebelum pemekaran Kecamatan Kranggan, terserapnya masyarakat yang lebih luas sebagai tenaga kerja di pemerintah Kecamatan Kranggan setelah adanya pemekaran kecamatan,
2. Pada variabel pemekaran kecamatan kecamatan item kuisisioner nomer 7 (PK7) yaitu terserapnya pemimpin lingkungan Kecamatan Kranggan yang berasal dari masyarakat Kecamatan Kranggan,
3. Pada variabel efektivitas pelayanan publik item kuisisioner nomer 3 (EP3) yaitu pelayanan yang

- dilakukan oleh pegawai Kecamatan Kranggan dapat diakses melalui teknologi telekomunikasi,
4. Pada variabel efektivitas pelayanan publik item kuisisioner nomer 5 (EP5) yaitu pelayanan yang diberikan pemerintah Kecamatan Kranggan bisa didapatkan oleh masyarakat Kecamatan Kranggan yang membutuhkan.
  5. Pada variabel efektivitas pelayanan publik item kuisisioner nomer 12 (EP12) yaitu pegawai Kecamatan Kranggan mampu melayani masyarakat dengan baik.

## B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka peneliti memiliki beberapa saran yang dapat berguna bagi pemekaran Kecamatan Kranggan agar kedepannya lebih baik dan berpengaruh terhadap pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan pada tujuan pembentukan kecamatan Kranggan. Saran tersebut antara lain :

1. Berdasarkan hasil penelitian, nilai terendah ialah pada poin peningkatan pendapatan masyarakat (PK3). Sehingga peneliti merekomendasikan agar pemerintah Kecamatan Kranggan lebih memberikan lapangan pekerjaan ataupun modal usaha agar tujuan pemekaran dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja dapat tercapai.
2. Berdasarkan hasil penelitian, nilai terendah juga pada kuisisioner nomer 6 (PK6) yakni terserapnya masyarakat yang lebih luas sebagai tenaga kerja di pemerintah Kecamatan Kranggan. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah Kecamatan Kranggan lebih menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat kecamatan Kranggan.
3. Berdasarkan hasil penelitian, nilai rendah juga pada PK7 pada variabel pemekaran kecamatan yaitu terserapnya pemimpin lingkungan Kecamatan Kranggan yang berasal dari masyarakat Kecamatan Kranggan. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah Kecamatan Kranggan memperbaiki proses perekrutan pemimpin kelurahan/kecamatan berasal dari wilayah Kecamatan Kranggan.
4. Berdasarkan hasil penelitian, nilai terendah juga pada EP3 yakni kemudahan akses pelayanan. Sehingga peneliti merekomendasikan agar pemerintah Kecamatan Kranggan meningkatkan akses pelayanan melalui teknologi dan komunikasi, membuat website untuk masyarakat dapat mendapatkan informasi dalam pengurusan dokumen ataupun layanan lainnya.
5. Berdasarkan hasil penelitian, Item kuisisioner EP5 pada variabel efektivitas pelayanan publik yaitu

pelayanan yang diberikan pemerintah Kecamatan Kranggan bisa didapatkan oleh masyarakat Kecamatan Kranggan yang membutuhkan. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah kecamatan Kranggan memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat kecamatan Kranggan baik pelayanan di kantor kecamatan maupun melalui program-program di kelurahan.

6. Berdasarkan hasil penelitian diketahui nilai rendah juga pada EP12 yaitu pegawai Kecamatan Kranggan mampu melayani masyarakat dengan baik. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah Kecamatan Kranggan meningkatkan kemampuan pegawainya dengan pelatihan maupun pemahaman mengenai pelayanan yang baik.

## Ucapan Terimakasih

Penulis menyadari bahwa selama masa penyusunan skripsi penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, nasihat, doa dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Para Dosen Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara FISH Unesa
2. Ibu Tjitjik Rahayu, S.Sos. M.Si selaku dosen pembimbing
3. Bapak Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos, M.AP selaku dosen penguji
4. Ibu Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP. selaku dosen penguji
5. Masyarakat Kecamatan Kranggan selaku sebagai responden penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Christopher B. Goodman. 2013. "Local Government Fragmentation & the Local Public Sector: A Panel Data Analysis". *Journal of Economy*. JEL Classification: H72; H73; H77.
- Firdaus, M. Aziz. 2012. *Metode Penelitian*. Tangerang Selatan : Jelajah Nusa.
- Hendratno, Edie Toet. 2009. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Herawati, Nunik Retno. 2011. "Pemekaran Daerah di Indonesia". *Jurnal Ilmu Politik*. Vol 2 No 1.
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : UII Press.

- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN [www.bps.mojokertokota.go.id](http://www.bps.mojokertokota.go.id)
- Moloeng, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Pratikno. 2001. *Otonomi Daerah : Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- Perda Kota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kranggan
- Rahmayanty, Nina. 2010. *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Riwokaho, Josef. 2003. *Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Santoso, Lukman AZ. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sedermayani. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Sinambela, Litjan Poltak, dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Wido Harumi. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang : Setara Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sujito, Ari. 2008. "Dinamika Kecamatan Di Era Desentralisasi". *Jurnal Wacana*. Edisi 16 Tahun XIV.
- Tjipto, Fandy dan Diana, Anastasia. 2001. *Total Quality Manajemen*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Wasistiono, Sadu. 2004. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung : Fokus Media.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- [www.mojokertokota.go.id](http://www.mojokertokota.go.id)
- [www.detik.news.co.id](http://www.detik.news.co.id)